

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
DAERAH BERBASIS WEB MELALUI APLIKASI SIGAJAH KERJA DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
HERISKA LUTHFIYAH ARIFIN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN
DAERAH BERBASIS WEB MELALUI APLIKASI SIGAJAH KERJA DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

HERISKA LUTHFIYAH ARIFIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAERAH BERBASIS WEB MELALUI APLIKASI SIGAJAH KERJA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

HERISKA LUTHFIYAH ARIFIN

Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah merupakan penerapan sistem informasi yang terpadu guna memberikan kemudahan dalam mengelola data dan informasi terkait ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah berbasis web melalui aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat jalannya kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan menggunakan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi serta melakukan wawancara kepada informan yang terlibat yaitu pegawai Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan, dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah berbasis web melalui aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung belum optimal jika ditinjau dari indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun saran dari penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat mampu meningkatkan perkembangan sistem aplikasi sigajah kerja yang lebih menarik. Selain Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan pihak – pihak terkait pengembangan fitur dan penyesuaian regulasi yang mengatur jalannya aplikasi sigajah kerja agar lebih baik lagi.

Kata Kunci: sistem informasi, ketenagakerjaan, aplikasi sigajah kerja

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM POLICY WEB-BASED REGIONAL JOBS VIA JOB NOTIFICATION APPLICATION (SIGAJAH KERJA) IN LAMPUNG PROVINCE

By

HERISKA LUTHFIYAH ARIFIN

Implementation of regional employment information system policies is the implementation of an integrated information system to provide convenience in managing employment-related data and information. This research aims to analyze how the web-based regional employment information system policy is implemented through the Job Sigajah application in Lampung Province and identify what factors hinder the implementation of this policy. This research uses a descriptive qualitative method which was carried out using four indicators of policy implementation according to George C. Edward III. Data collection techniques were carried out by means of observation, documentation and conducting interviews with the informants involved, namely employees of the Manpower, Company and Community Services. Based on the research results, it was found that the implementation of the web-based regional employment information system policy through the job alert application in Lampung Province was not optimal when viewed from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The suggestion from this research is that the Manpower Department is expected to be able to improve the development of a more attractive job application system. Apart from that, the Department of Manpower is expected to increase collaboration with related parties in developing features and adjusting regulations that regulate the running of the Sigajah Jobs application to make it even better.

Keywords: *information system, employment, Sigajah kerja application*

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
DAERAH BERBASIS WEB MELALUI
APLIKASI SIGAJAH KERJA DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Heriska Luthfiah Arifin**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1916041033**

Jurusan

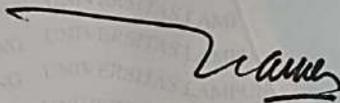
: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial Ilmu Politik**

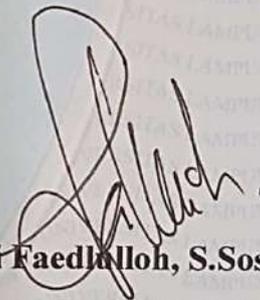
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

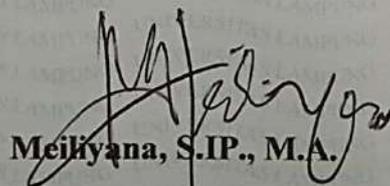
NIP. 19630206 198803 1 002



Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.

NIP. 19880712 201903 1 012

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**



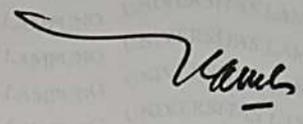
Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

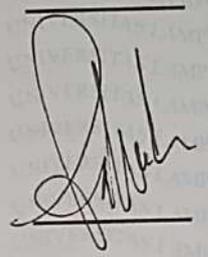
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

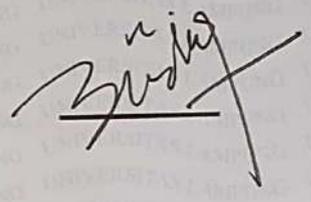
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**



Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Januari 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Heriska Luthfiyah Arifin
NPM 1916041033

RIWAYAT HIDUP



Heriska Luthfiah Arifin, lahir di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 17 Mei 2001 sebagai anak Pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Hermansyah Nuriansyah dan Ibu Risna Arif. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Beringin Raya pada tahun 2007-2013, selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Bandar Lampung tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 14 Bandar Lampung tahun 2016-2019, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis juga cukup aktif dalam mengikuti organisasi tingkat Fakultas maupun Jurusan yaitu PSM UNILA dan HIMAGARA. Pada Januari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selanjutnya pada Maret hingga Agustus 2022 penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*“I have my ways, and i’ve been working on them for all this time. Even if you
look down upon me, you have no right to judge me!”*

(Furina, Genshin Impact)

“Hidup ini sulit dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan baik, namun
kita tetap harus berani dan melanjutkan hidup kita ”

(BTS, Bangtan Sonyeondan)

“Pelan – Pelan aja, setiap perjalanan pasti ada akhirnya”

(Heriska Luthfiyah Arifin)

PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Segala puji bagi Allah SWT. Dzat yang Maha Sempurna.
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada
Rasulullah Muhammad SAW.*

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

*Papa (Hermansyah Nuriansyah) dan Mama (Risna Arif) yang senantiasa
mendoakan, mendukung dan menyemangatiku untuk terus maju
menyelesaikan skripsi ini sampai akhir*

*Saudariku tersayang (Ananda Zahra Salsabilla) yang selalu memberikan
semangat, dukungan serta menghiburku. Terimakasih untuk tetap sabar
mengadapi kakak-nya yang lambat ini*

*Dosen pembimbingku yang telah memotivasi dan
membimbingku dengan penuh kesabaran*

*Serta sahabat dan saudara seperjuanganku Savira dan Amel.
Terimakasih karena sudah mau mengulurkan tangan untuk membantuku
serta mendukung, dan memberikan semangat yang tulus kepadaku sampai akhir*

Almamater Universitas Lampung tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Puji syukur penulis penatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi Sigajah Kerja di Provinsi Lampung”**. Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dan hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan ilmu yang Bapak berikan kepada penulis. Terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memotivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Terimakasih juga karena Bapak selalu sabar dalam memberikan arahan dan terus membimbing penulis sampai akhir. Semoga Pak Bambang selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing pendamping penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang bapak berikan kepada penulis. Terimakasih juga

karena bapak selalu sabar ketika mengarahkan penulis mengenai penelitian yang akan lakukan. Semoga Pak Dodi selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.

3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M. AP, selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk seluruh saran dan masukan yang Pak Eko berikan kepada penulis sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Serta terimakasih untuk seluruh ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga Pak Eko selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
4. Miss Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen maupun staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu dan nasihat selama proses perkuliahan.
9. Kepada teman, sahabat, partner perjuangan, dan Senpai didunia nyata maupun didunia lainnya, Amelia Tasyah. Penulis sangat berterimakasih karena telah diberikan support moral, tenaga, dan dukungan yang penuh untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selalu menyemangati dan menemani penulis untuk bisa terus melangkah menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Terimakasih karena tanpa kamu skripsi ini tidak akan ada dan tanpa kamu aku gak akan bisa sampai di tahap ini.
10. Kepada sahabatku, teman perjuangan, keluarga, saudaraku yang paling kusayang, Savira. Terimakasih karena telah membantu penulis dan terus menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Entah berapa banyak terimakasih yang bisa aku ucapin, orang terdepan yang membelaku dan membantuku saat aku terpuruk. semoga kedepannya tetap terus

mendukungku dan menemaniku sampai tua nanti dan semoga Pertemanan kita gak bakal putus ya.

11. Kepada Sobat circle Meikarta (Srei, Julia, Miranda, Senja) terimakasih telah menemani penulis selama ini, terimakasih atas bantuan dan telah berbagi canda tawanya, serta menemani hari - hari penulis selama perkuliahan kita empat tahun ini. Semoga kehidupan kita kedepannya bisa lebih baik lagi dari ini dan bisa berbagi cerita kita masing – masing.
12. Kepada teman-teman GRANADA, terimakasih untuk waktu yang telah dilewati bersama.
13. Teman – teman Moveable (KKN Desa Srengsem), terimakasih atas canda tawa serta dukungan yang telah diberikan selama KKN maupun setelahnya dan telah menjadi bagian dari cerita perjalan penulis selama diperkuliahan ini.
14. Kepada Zhongli, Kazuha, Furina, dan Kaveh yang telah menjadi moral support bagi penulis karena cerita kalian telah mengingatkan penulis untuk selalu kuat dalam kondisi apapun dan akhirnya penulis dapat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
15. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi.

Bandar Lampung, 18 Januari 2024
Penulis,

Heriska Luthfiyah Arifin

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik	14
2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan	15
2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik	17
2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	21
2.5 Tinjauan Sistem Informasi	22
2.6 Tenaga Kerja	23
2.7 Tinjauan Tentang SiGajah Kerja	24
2.8 Kerangka Pemikiran	26
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Lampung	41
4.1.2 Topografi Provinsi Lampung.....	42

4.1.3 Keadaan Penduduk Provinsi Lampung	42
4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	42
4.2.1 Profil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	42
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	43
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	45
4.3 Hasil Penelitian.....	46
4.4 Pembahasan.....	79
4.4.1 Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung	79
4.4.2 Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi Sigajah Kerja di Provinsi Lampung	91
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

1. Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung	3
2. Data Perusahaan, Lowongan Kerja, Pencari Kerja, dan Pencari Kerja yang diterima di Perusahaan Melalui Aplikasi SiGajah Lampung Tahun 2022	4
3. Penelitian Terdahulu	9
4. Informan Penelitian.....	33
5. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	63
6. Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dalam Implementasi Aplikasi Sigajah Kerja.....	72

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

	Halaman
1. Website SiGajah Kerja	24
2. Kerangka Pemikiran.....	28
3. Komponen Analisis Data.....	38
4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	45
5. Keputusan Gubernur tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung Melalui Aplikasi SiGajah Lampung	47
6. Laman Pengisian Profil bagi Pengguna Aplikasi Sigajah Kerja.....	48
7. Klasifikasi Jenis Lowongan Pekerjaan dalam Aplikasi Sigajah Kerja.....	49
8. Lowongan Pekerjaan dalam Aplikasi Sigajah Kerja.....	49
9. Sosialisasi Kegunaan dan Manfaat aplikasi SiGajah pada Perusahaan dan masyarakat di Provinsi Lampung.....	51
10. Bentuk Penyaluran informasi kolaborasi Dinas dengan Perusahaan melalui kegiatan Job Fair aplikasi sigajah kerja di media sosial.....	52
11. Akun sosial media (instagram) Sigajah Lampung	53
12. Hasil Kepuasan Pengguna Aplikasi Sigajah Lampung	56
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.....	58
14. Surat Edaran Kepada Perusahaan tentang Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) melalui Sigajah Kerja.....	59
15. Koordinasi Dinas Tenaga Kerja dengan Kemnaker Tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sigajah Lampung)	61
16. Aktivitas Dinas Tenaga Kerja di Media Sosial (@sigajah_Lampung)	62
17. Pemberian informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi Sigajah Kerja	65
18. Pemberitahuan kepada perusahaan tentang pelaporan informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi sigajah lampung	66
19. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tentang Penetapan Petugas Jasa Tenaga Operator Komputer Non PNS.....	68
20. Informasi kelengkapan fitur terbaru dalam aplikasi sigajah kerja melalui media sosial.....	70

21. Proses Pemberitahuan Kelengkapan Informasi oleh Petugas/Admin Aplikasi Sigajah kerja	74
22. Aktivitas Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan informasi mekanisme aplikasi sigajah kerja melalui Sosial Media.....	75
23. Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	77
24. Rapat Koordinasi persiapan Job Fair melalui Aplikasi sigajah Kerja dalam Pekan Raya Lampung 2023	79

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan menjadi sebuah topik yang selalu hadir seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut memunculkan permasalahan salah satunya yaitu pengangguran dan ini menjadi salah satu masalah penting yang terus terjadi di masyarakat, Pengangguran sendiri adalah situasi dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Widayati, 2021). Fenomena ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti: 1) kelangkaan kesempatan kerja untuk melayani mereka yang mencari pekerjaan; 2) minimnya keterampilan yang dimiliki pencari kerja; 3) terbatasnya ketersediaan informasi, menghambat pencari kerja untuk menemukan lowongan kerja di perusahaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja; 4) distribusi prospek pekerjaan yang tidak merata; 5) upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan belum mencapai potensi maksimalnya (Ishak, 2018).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Pusat melalui PP Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yaitu sebuah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja guna mengelola data dan informasi terkait ketenagakerjaan.

Sistem informasi ketenagakerjaan tersebut telah diwujudkan dalam sistem LMIS (*Labor Market Information System*). LMIS adalah Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui sebuah platform online terkait informasi ketenagakerjaan guna meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan hasil ketenagakerjaan sehingga suatu negara dapat memenuhi potensi pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, LMIS dikembangkan lebih lanjut dalam dengan mengusung beberapa elemen kunci guna menghasilkan informasi dan data yang relevan bagi para penggunanya. Sistem ini telah wujudkan dalam sebuah platform yaitu AyoKitaKerja yang diluncurkan pada tahun 2016 (Testaverde et al., 2021).

Mengutip dari *World Bank Group*, sejatinya Indonesia masih mengalami kegagalan dalam pasar tenaga kerja, hal tersebut terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki para pencari kerja serta banyaknya jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi namun belum mampu mendapatkan pekerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Selain itu, keterbatasan informasi ketenagakerjaan baik dari sisi pencari kerja maupun pemberi kerja membuat tidak efisiensinya ketersediaan lapangan kerja yang disediakan dan berakibat pada terbatasnya peluang ekonomi bagi pencari kerja dan perusahaan pun tidak puas dengan keterampilan pekerja yang didapatkan karena ketidaksesuaian keterampilan dengan pekerjaan mereka. (Testaverde et al., 2021).

Terhitung pada Agustus 2021, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 6,49% jumlah tersebut mengalami kenaikan 0,23% dibandingkan pada Februari 2021 yang sebesar 6,26% (dataindonesia.id, 2022). Di Provinsi Lampung sendiri, kondisi angkatan kerja terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun nya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran
2021	9.081.792	4.494,95	69,35%	210.632	4,69%
2022	9.176.546	4.595,93	70,06%	207.965	4,52%

Sumber: (BPS, Tenaga Kerja Prov. Lampung)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sejatinya kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Namun dari kondisi tersebut pada jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat. Oleh karena itu agar kedepannya angka pengangguran tersebut dapat terus diturunkan, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengambil langkah jitu sebagai upaya untuk mengatasi dan membantu masyarakat khususnya para pencari kerja yang dimuat dalam aplikasi SiGajah (Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung).

SiGajah atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung merupakan platform teknologi berbasis online yang dapat langsung digunakan melalui *mobile phone* atau perangkat komputer dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh Gubernur Arinal Djunaidi pada 7 Februari 2022 dan memuat 4 fitur terkait ketenagakerjaan antara lain: SiGajah Kerja, SiGajah Konsul, SiGajah Latih dan SiGajah Magang. Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah berharap dapat menekan angka pengangguran dengan mempertemukan antara penyedia kerja dan pencari kerja (ppid.lampungprov, 2022).

Aplikasi SiGajah Kerja adalah program bursa kerja online yang mempertemukan para penyedia kerja dengan para pencari kerja dalam satu platform online. Salah satu dari 4 fitur SiGajah ini melayani masyarakat

khususnya para pencari kerja agar lebih mudah dalam mencari pekerjaan yang terjamin aman dan terpercaya sesuai pengawasan pemerintah sehingga terhindar dari informasi lowongan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, melalui kanal *youtube* Pemerintah Provinsi Lampung, aplikasi ini juga menjamin para pencari kerja karena pekerjaan yang ditawarkan terpercaya, proses rekrutmen bebas dari biaya apapun, pengumuman dan proses seleksi diumumkan secara transparan dan serta banyaknya lowongan kerja yang ditawarkan guna meningkatkan peluang masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Pelaksanaan Aplikasi SiGajah Kerja ini, diharapkan dapat membantu menjembatani antara para pencari kerja dan pemberi kerja serta sebagai upaya agar rekrutmen tenaga kerja menjadi lebih terbuka dan transparan. Namun pada kenyataannya, penerapan aplikasi SiGajah Kerja masih ditemui beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Data Perusahaan, Lowongan Kerja, Pencari Kerja, dan Pencari Kerja yang diterima di Perusahaan Melalui Aplikasi SiGajah Lampung Tahun 2022

Bulan	Perusahaan	Lowongan Pekerjaan	Pencari Kerja	Pencari Kerja yang diterima
Januari	0	0	1	0
Februari	0	0	137	0
Maret	28	2	246	0
April	1	6	1734	0
Mei	3	2	337	0
Juni	19	0	1003	0
Juli	3	0	436	0
Agustus	9	5	626	1
September	8	12	344	1
Oktober	1	14	261	0
November	4	3	201	0
Desember	5	5	169	0
TOTAL	81	49	5495	2

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program Penempatan Kesempatan Kerja 2022

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penerapan aplikasi SiGajah belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan dan masyarakat yang memakai aplikasi sigajah kerja. padanya nyatanya dari 207.965 pengangguran di Provinsi Lampung, hanya 5.495 saja yang menggunakan aplikasi ini. Selain itu kurangnya kesadaran perusahaan dalam membantu memberikan informasi lowongan kerja melalui aplikasi SiGajah Kerja, walaupun hal tersebut telah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perusahaan wajib melaporkan informasi lowongan pekerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuknya (dalam hal ini yaitu Gubernur yang melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi). Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Kepala Seksi Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dian Rahmawati yang menjelaskan bahwa pada proses pelaksanaannya, pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi sudah menjelaskan secara detail mengenai alur dan manfaat dari adanya aplikasi SiGajah Kerja, namun hanya sedikit perusahaan yang tertarik untuk ikut mendaftarkan perusahaannya dalam aplikasi SiGajah sehingga pelaksanaan aplikasi ini tidak dapat berjalan sesuai dengan target serta tujuan yang diinginkan oleh Dinas Tenaga kerja (wawancara, 30 Agustus 2023).

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu yang menjelaskan bahwa dari 9 ribu perusahaanaan yang ada di Lampung, baru 2 persen saja yang menggunakan Aplikasi SiGajah Kerja ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait program ini. Apabila 9 ribu perusahaan di Lampung membuka 1 lapangan pekerjaan, maka akan ada 9 ribu orang akan terserap dan dapat menurunkan angka pengangguran terbuka di daerah (Khoiriah, 2022).

Berbeda halnya dengan Provinsi Lampung, sejatinya sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web sudah dilaksanakan pada daerah lain seperti pelaksanaan Program Sisnaker di Provinsi Sumatra Barat yang

menyatakan bahwa pelaksanaan sistem informasi ketenagakerjaan melalui Program Sisnaker mampu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait ketenagakerjaan dan Program ini menjadi terobosan baru bagi Dinas Tenaga Kerja Sumatra Barat dalam memberikan pelayanan tentang pelatihan, informasi lowongan pekerjaan, informasi magang ke luar negeri dan lain sebagainya (Arif et al, 2022).

Hal ini sejalan dengan penerapan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makasar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan Suarni menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web dapat membantu pencari kerja dan pemberi kerja agar terhubung langsung dalam satu layanan yang dimonitoring oleh pihak Disnaker Kota Makasar, selain itu Disnaker dapat dengan mudah mengamati lowongan pekerjaan dan mengelola data tersebut agar lebih terstruktur dalam membantu masyarakat di berbagai pihak (Hayati dan Suarni, 2018).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah berbasis web melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung. Penelitian dapat dijadikan acuan/referensi kepada Pemerintah Daerah, Perusahaan serta masyarakat di Provinsi Lampung untuk melihat seperti apa pelaksanaan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui Aplikasi SiGajah Kerja ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung?

2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung
2. Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi ilmu administrasi negara maupun pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik terkait penggunaan teori implementasi kebijakan menurut George C.Edward III yang masih relevan digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberikan informasi dan masukan terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah Berbasis Web Melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Masyarakat Umum, Organisasi masyarakat, dan Lembaga pemerintahan lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang memuat hasil penelitian sebelumnya yang sudah lebih dulu dirumuskan. Hasil penelitian ini dirangkum menjadi lebih ringkas agar menjadi bahan bukti keaslian dan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Pereira, A. D. P. S., & Hakim, A. (2015).	Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (<i>Sistema Informasaun Merkadu Trabalhu</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan daripada program yang telah ditetapkan sebelumnya	Relevansi dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam penggunaan teori menurut Edward III dalam membahas terkait bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah di daerah Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokus dan objek penelitian yang menganalisis sistem informasi pasar tenaga kerja (SIMU) Pada divisi nasional orientasi profesional dan pekerjaan Timor Leste. Selain itu Perbedaan juga terletak pelaksanaan Sistem Informasi <u>Pasar Tenaga Kerja</u>

“SIMU” yang berfokus pada penyaluran serta memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Sedangkan dalam penelitian ini, Sistem Informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi SiGajah kerja hanya memuat berbagai informasi terkait lowongan pekerjaan bagi masyarakat khususnya para pencari kerja.

2	Hayati, L. N., & Suarni, S. (2018)	SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR DISNAKER KOTA MAKASSAR BERBASIS WEB.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web ini pihak pencari kerja dan pemberi kerja dapat terhubung dalam satu layanan, lalu pihak administrator dapat dengan mudah mengamati lowongan yang terbuka maupun lamaran dari berbagai pihak serta dengan mudah mengelola data yang lebih terstruktur untuk keperluan.	Relevansi dalam penelitian ini adalah kesamaan dalam pembahasan suatu terkait sistem informasi ketenagakerjaan di daerah Berbasis Website Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokus dan objek penelitian yang menganalisis sistem informasi berbasis web pada kantor disnaker kota makassar. Perbedaan lain dalam penelitian ini juga terletak pada fokus penelitian yang hanya menilai bagaimana implementasi sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web ini di masyarakat dengan melakukan pengujian terhadap sistem. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melihat bagaimana implementasi
---	------------------------------------	---	---	--

				kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi sigajah kerja dengan 4 indikator implementasi kebijakan antara lain: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi.
3	Asri, S. A., Sunaya, I. G. A. M., Rudiastari, E., & Setiawan, W. (2018)	<i>Web based information system for job training activities using personal extreme programming (PXP). In Journal of Physics</i>	Sistem Informasi berbasis web sedang berkembang pesat karena kemudahannya dan fleksibilitasnya yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengembangan sisten informasi berbasis web dengan menggunakan perangkat lunak PXP dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 65 responden yang ada, 74% setuju bahwa fungsional dari sistem informasi berbasis web ini sangat berguna dengan menyediakan fitur yang mudah dan cepat diakses oleh pengguna.	Relevansi dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap suatu program terkait sistem informasi ketenagakerjaan menggunakan teknologi website/Program Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus pengukuran dimana dalam penelitian ini, berawal dari mengembangkan suatu sistem menggunakan perangkat lunak terkait dan melakukan pengujian setelahnya dengan membagikan kuisioner kepada responden (pengguna). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan mengukur bagaimana Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah yang dimuat dalam sebuah aplikasi SiGajah kerja kepada masyarakat guna melihat apakah program dapat

				mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.
4	Waters, K. P., Zuber, A., Willy, R. M., Kiriinya, R. N., Waudu, A. N., Oluoch, T., & Riley, P. L. (2013)	<i>Kenya's health workforce information system: a model of impact on strategic human resources policy, planning and management. International journal of medical informatics</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi tenaga kerja kesehatan kenya membantu pemerintah untuk mendapatkan data tenaga kerja kesehatan yang profesional, selain itu sistem informasi ini juga memberikan fasilitas berupa pelatihan profesional kenapa tenaga kerja kesehatan guna menghasilkan peningkatan kualitas perawatan dan dengan adanya sistem informasi tenaga kesehatan kenya memberikan kontribusi yang besar terhadap kebijakan tenaga kesehatan serta untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan dan maldistribusi	Relevansi dalam penelitian ini adalah topik penelitian yang diangkat yaitu tentang sistem ketenagakerjaan Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokus penelitian dan metode penelitian dimana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam metode kualitatif peneliti melihat dampak dari adanya sistem informasi tenaga kerja kesehatan ini dengan mewawancarai pemerintah terkait sedangkan dalam metode kuantitatif peneliti menggunakan metode snowball untuk mengidentifikasi apakah penggunaan sistem informasi tenaga kesehatan perubahan pada regulasi tenaga kesehatan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apakah Aplikasi SiGajah Kerja efektif dalam meningkatkan produktivitas pencari kerja di <u>Provinsi Lampung.</u>

5	Hasti, N., Lesari, S., & Gustiana, I. (2019)	<i>Web-Based Internship Information – System.</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi magang, membantu dalam mempermudah proses pengelolaan magang secara keseluruhan, selain itu dapat membantu masyarakat khususnya mahasiswa terkait informasi magang dengan lebih mudah dan cepat	Relevansi dalam penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang sistem informasi berbasis sistem web Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan yang berorientasi pada perancangan dan pengembangan suatu program. selain itu dalam penelitian ini, selain itu peneliti melakukan pengujian sistem informasi menggunakan metode black box dimana metode ini berfokus pada persyaratan fungsional dari sebuah perangkat lunak. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi SiGajah kerja yang dilihat dari 4 indikator terkait yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
---	---	---	--	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023

Dari beberapa hasil penelitian diatas, relevansi dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan guna membantu masyarakat agar lebih mudah

mendapatkan informasi mengenai ketenagakerjaan dan lebih produktif dalam mencari pekerjaan guna mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Dilihat dari penelitian tersebut, para peneliti berfokus pada bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya implementasi sistem informasi sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan mengkaji sistem informasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung yang diwujudkan melalui aplikasi SiGajah Kerja yang akan dilihat dari sisi keoptimalan kebijakan dengan menekankan pada proses implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III melalui empat indikator antara lain: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik juga diartikan sebagai sebuah instrumen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menjadi solusi bagi masyarakat. Selain itu kebijakan publik digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan bagi kepentingan seluruh masyarakat (Purba *et al*, 2022). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Dunn (1994) bahwa kebijakan publik adalah sebuah rangkaian pilihan – pilihan yang memiliki keterkaitan dan dibuat oleh suatu lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tugas pemerintahan yang menyangkut masyarakat seperti kriminalitas, perkotaan, dan lain sebagainya

Kebijakan publik juga sangat penting dalam studi Ilmu Administrasi Publik seperti yang dijelaskan oleh Widodo (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu teori yang menjelaskan tentang

aktivitas yang dilakukan oleh para aktor kebijakan (*stakeholders*) dalam menjawab serta mengatasi permasalahan yang terjadi di publik

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah instrumen kebijakan yang dibuat dan digunakan oleh para aktor kebijakan yaitu pemerintah guna mengatur dan mengatasi suatu permasalahan yang terjadi masyarakat. Dalam membuat sebuah kebijakan publik, tentu adanya proses atau tahapan dalam merumuskannya. Menurut Thomas R. Dye (dalam Widodo, 2021) proses dalam kebijakan publik meliputi beberapa tahapan antara lain: 1) Identifikasi Masalah, 2) Penyusunan Agenda, 3) Perumusan Kebijakan, 4) Pengesahan Kebijakan, 5) Implementasi Kebijakan, dan 6) Evaluasi Kebijakan

2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam kebijakan publik dimana dapat diartikan sebagai aktivitas dalam melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan/ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana guna mencapai sebuah tujuan kebijakan (Tachjan, 2006). Hal ini sejalan dengan apa yang dituturkan oleh Wahab (dalam Mustari, 2015) dimana implementasi kebijakan yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu- individu, para pejabat atau kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Nugroho (dalam Sueca, 2020) juga menuturkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk menjalankan suatu kebijakan dalam ranah yang senyatanya. Hal ini dapat dilakukan baik dari organ pemerintahan maupun dari pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi baik pemerintah, organisasi masyarakat atau pihak – pihak terkait guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.

Dalam proses Implementasi juga perlu memperhatikan unsur – unsur yang ada dalam melaksanakan sebuah Kebijakan/program. Tachjan (2006) ada tiga unsur mutlak dalam implementasi kebijakan diantaranya;

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah pihak – pihak yang mempunyai wewenang dalam pengimplementasian program. Dimock dan Dimock (dalam Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa pihak – pihak yang memiliki wewenang yaitu unit – unit administratif/birokratik yang didasarkan pada otoritas dan kapasitas administratifnya mulai dari penentu tujuan dan sasaran organisasional, analisis dan perumusan kebijakan serta strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional serta perngawasan dan penilaian.

2. Program

Program merupakan sebuah pengimplementasian dari sebuah kebijakan administratif yang berupa pernyataan umum terkait tujuan, sasaran dan berbagai macam sarana dalam kebijakan. Program menggambarkan kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai, prosedur, serta alokasi sumber daya yang diperlukan.

3. Kelompok sasaran (*Target Group*)

Kelompok sasaran adalah masyarakat yang akan menerima barang atau jasa dari suatu kebijakan. Kelompok sasaran diharapkan dapat menyesuaikan diri dan menerima pola – pola interaksi yang telah

ditentukan oleh kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penting dalam proses implementasi program karena kesesuaian isi kebijakan (program) tergantung pada seberapa jauh kelompok sasaran tersebut dapat mematuhi dan menyesuaikan diri dengan program yang diimplementasikan. Oleh karena itu, komunikasi dalam mensosialisasikan isi kebijakan pada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2.3.1 Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Menurut Charles O.Jones (dalam Kadji, 2015) implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- 1) Organisasi, yaitu bahwa dalam setiap implementasi kebijakan publik, kapanpun dan dimanapun kebijakan tersebut dioperasionalkan haruslah didukung oleh eksistensi organisasi yang fleksibel serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas yang juga didukung oleh adanya implementor kebijakan yang handal dan memiliki kapasitas yang tidak diragukan dalam menjalankan tugas keorganisasian, agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat diterima untuk kepentingan publik
- 2) Interpretasi, yaitu kebijakan yang dapat dijabarkan atau diinterpretasi sampai kepada hal – hal yang lebih teknis dan implementatif sehingga setiap orang atau implementor kebijakan dapat lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar sesuai dengan sasaran dan target yang akan dicapai.

- 3) Aplikasi (penerapan), dalam hal ini setiap produk kebijakan yang dijalankan oleh organisasi dapat dilihat pada kemampuan para implementor kebijakan publik dalam melakukan tindakan nyata agar setiap produk kebijakan bermanfaat bagi kepentingan publik.

b. Model Implementasi Kebijakan Thomas B. Smith

Menurut model proses smith (dalam Tachjan, 2006) dalam proses implementasi kebijakan terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel tersebut antara lain:

1. Kebijakan yang diidealkan, yaitu pola – pola dalam interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan dan berusaha untuk diinduksikan. Dalam hal ini pola interaksi yang di gagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi, mendorong serta merangsang target group untuk melaksanakannya
2. Kelompok Sasaran (*target group*), yaitu orang–orang yang dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola–pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dalam hal ini, kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan yang telah dirumuskan
3. Organisasi Pelaksana (*implementing organization*), adalah orang – orang atau badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan.
4. Faktor Lingkungan (*environmental factor*), yaitu unsur – unsur di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model Implementasi Kebijakan George Edward III (dalam Kusnadi, 2020) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat suatu proses yang dinamis serta terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi dilihat melalui empat variabel yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi yaitu berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang dikomunikasikan kepada organisasi atau masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi menentukan berhasil tidaknya tujuan implementasi kebijakan publik tercapai. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil kebijakan telah mengetahui apa yang mereka lakukan, dan mengetahui apa yang mereka lakukan akan berhasil jika dikomunikasikan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan dengan benar. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat , akurat dan konsisten. Komunikasi (atau transfer informasi) diperlukan agar pengambil keputusan dan pelaksana lebih selaras dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Tiga aspek yang sangat penting dalam sebuah komunikasi diantaranya: a) Transmisi, yaitu bagaimana penyaluran informasi mengenai suatu implementasi kebijakan; b) Kejelasan, untuk mengukur bagaimana kejelasan informasi yang diterima agar tidak membingungkan atau menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai; c) Konsistensi, yaitu bagaimana kejelasan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tiga indikator terkait yaitu: a) Staf, untuk melihat bagaimana keahlian dan kemampuan staf dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas sesuai dengan isi kebijakan; b) Informasi, yang berhubungan dengan pengetahuan implementor terkait implementasi kebijakan dan informasi kepatuhan para pelaksana sesuai dengan peraturan dan regulasi yang pemerintah telah ditetapkan; c) Wewenang, itu bagaimana legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik; d) Fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan efektif jika para pelaksana kebijakan mengetahui dan memiliki kemampuan tentang apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik. Adapun dua indikator yang harus diperhatikan dalam struktur organisasi antara lain: a) *standar operating prosedures* (SOP), yaitu bagaimana pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan; b) Fragmentasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab mengenai kegiatan pegawai sesuai dengan bidangnya masing – masing.

Berdasarkan beberapa model yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah daerah berbasis web melalui aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung akan dilihat menggunakan model teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang dilihat melalui empat variabel terkait yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut karena teori tersebut mampu menjelaskan dari sudut pandang kebijakan tentang bagaimana implementasi sistem informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung baik dari bagaimana komunikasi yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung kepada masyarakat dan perusahaan, seperti apa sumber daya yang mendukung dalam pengimplementasian aplikasi SiGajah kerja, serta bagaimana sikap dan struktur birokrasi dalam pelaksana kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis web melalui aplikasi SiGajah di Provinsi Lampung.

2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (dalam Anggi, 2021) implementasi kebijakan dapat terhambat oleh beberapa faktor tertentu diantaranya yaitu:

1. Isi Kebijakan

Jelas atau tidaknya isi dalam sebuah kebijakan sangatlah mempengaruhi jalannya kebijakan itu sendiri, implementasi kebijakan akan gagal jika isi dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu kurangnya ketetapan baik sumber daya maupun biaya/dana dalam isi kebijakan akan menghambat jalannya implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Ketersediaan informasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan. Untuk itu, para

implementor haruslah mempunyai informasi yang cukup mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut agar implementor kebijakan dapat mengetahui tentang apa yang harus dilakukan untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Oleh karena itu kurangnya informasi yang dimiliki oleh implementor kebijakan dapat menghambat jalannya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya.

3. Dukungan

Pelaksanaan sebuah kebijakan tentunya harus memiliki dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan akan sulit dilaksanakan jika dukungan yang diterima tidak cukup kuat.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi berkaitan dengan struktur organisasi pada implementor kebijakan. Pembagian tugas dan wewenang yang tidak sesuai dengan bidangnya akan menghambat jalannya sebuah kebijakan dan tentu hal tersebut akan memagalkan implementasi kebijakan tersebut.

2.5 Tinjauan Sistem Informasi

Menurut Henry C. Lucas (dalam Darmastuti, 2013) Sistem Informasi adalah kegiatan dari suatu prosedur-prosedur yang diorganisasikan bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Hal serupa dijelaskan oleh Budi Sutedjo (2006) yang menyatakan bahwa sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut.

Sistem Informasi juga diartikan sebagai sistem yang diterapkan dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan untuk semua tingkatan manajemen karena informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan (Sutabri, 2012).

Sedangkan menurut Hutahaean (2012) Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mengkoordinasikan kebutuhan pengelolaan urusan sehari-hari, mendukung fungsi operasional manajerial organisasi dan kegiatan strategis organisasi sehingga dapat memberikan pelaporan yang diperlukan kepada pihak eksternal tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang melalui prosedur dan elemen yang berkaitan untuk dapat memudahkan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi guna membuat dan memutuskan tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi.

2.6 Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk pada usia kerja yaitu 15-64 tahun yang secara potensial dapat bekerja dan memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka (sedarmayanti, 2010). Ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Dumairy (dalam Suprpto, 2011) bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja minimum 15 tahun. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah berusia 15 tahun tergolong sebagai tenaga kerja.

Sedangkan menurut sumarsono (2003) mengatakan bahwa tenaga kerja merujuk pada semua orang yang bersedia bekerja, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri atau anggota keluarganya tetapi tidak dibayar dalam bentuk upah, atau mereka yang sebenarnya bersedia dan mampu bekerja namun terpaksa kehilangan pekerjaan karena tidak adanya kesempatan kerja.

Menurut Dumairy (dalam Suprpto, 2011) Tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok antara lain:

a. Angkatan Kerja (*labor force*)

Tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang sedang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja (tidak termasuk angkatan kerja) adalah pekerja atau penduduk usia kerja yang tidak bekerja, dan tidak sedang mencari pekerjaan, yaitu yang kegiatannya bersekolah (pelajar), pengasuh anggota keluarga (mengacu pada kepada ibu - ibu rumah tangga yang tidak bekerja) dan menerima pendapatan, tetapi bukan kompensasi langsung atas layanan pekerjaan mereka (pensiunan, penyandang disabilitas yang menjadi tanggungan).

Oleh karena itu, dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah individu dalam usia kerja yang siap dan mampu dalam menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan tenaga mereka.

2.7 Tinjauan Tentang SiGajah Kerja



Gambar 1. Website SiGajah Kerja
(Sumber : sigajahkerja.disnaker.lampungprov.go.id)

SiGajah Kerja atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung Layanan Bursa Kerja merupakan sebuah program dengan platform online yang dirancang khusus untuk membantu menghubungkan

para pencari kerja dan Perusahaan dalam satu platform, hal ini dilakukan agar para pencari kerja maupun penyedia kerja dengan mudah mendapatkan dan memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan dan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, melalui program ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang program pelatihan kerja serta permagangan dan perusahaan tidak perlu untuk memasang iklan lowongan kerja di media dan SiGajah Kerja menjamin penyedia kerja yang ada adalah organisasi yang sah secara hukum guna menghindari informasi lowongan kerja yang tidak bertanggung jawab (lampungprov.go.id, 2022).

Dasar pelaksanaan aplikasi SiGajah Kerja mengacu pada beberapa peraturan terkait diantaranya: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang informasi lowongan pekerjaan, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/635/V.08/HK/2021 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung (SiGajah Lampung) dalam jaringan/online.

Adapun dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses Program ini melalui laman resmi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu *sigajahkerja.disnaker.lampungprov.go.id* atau bisa mendownload Aplikasinya di *Playstore*. SiGajah Kerja memuat berbagai macam lowongan pekerjaan yang dibagi dalam beberapa kategori yaitu: Pelayanan, Pendidikan/Pelatihan, Bangunan/Konstruksi, Layanan Kesehatan, Akuntansi/keuangan, Seni/Media/Komunikasi, Penjualan/Pemasaran, dan lain sebagainya.

Dalam mekanismenya, melalui kanal *youtube* Pemerintah Provinsi Lampung, pencari kerja dapat membuat akun dengan mengisi data diri dan upload bukti kompetensi yang dimiliki agar dapat mengajukan lowongan pekerjaan, setelah terdaftar masyarakat dapat mulai mencari

lowongan pekerjaan yang sudah tersedia di menu lowongan. Bagi penyedia kerja, dapat mendaftarkan usahanya dan upload bukti legalitas usahamu, lalu akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh Disnaker. Setelah mendapatkan akun resmi penyedia kerja dapat memposting lowongan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan.

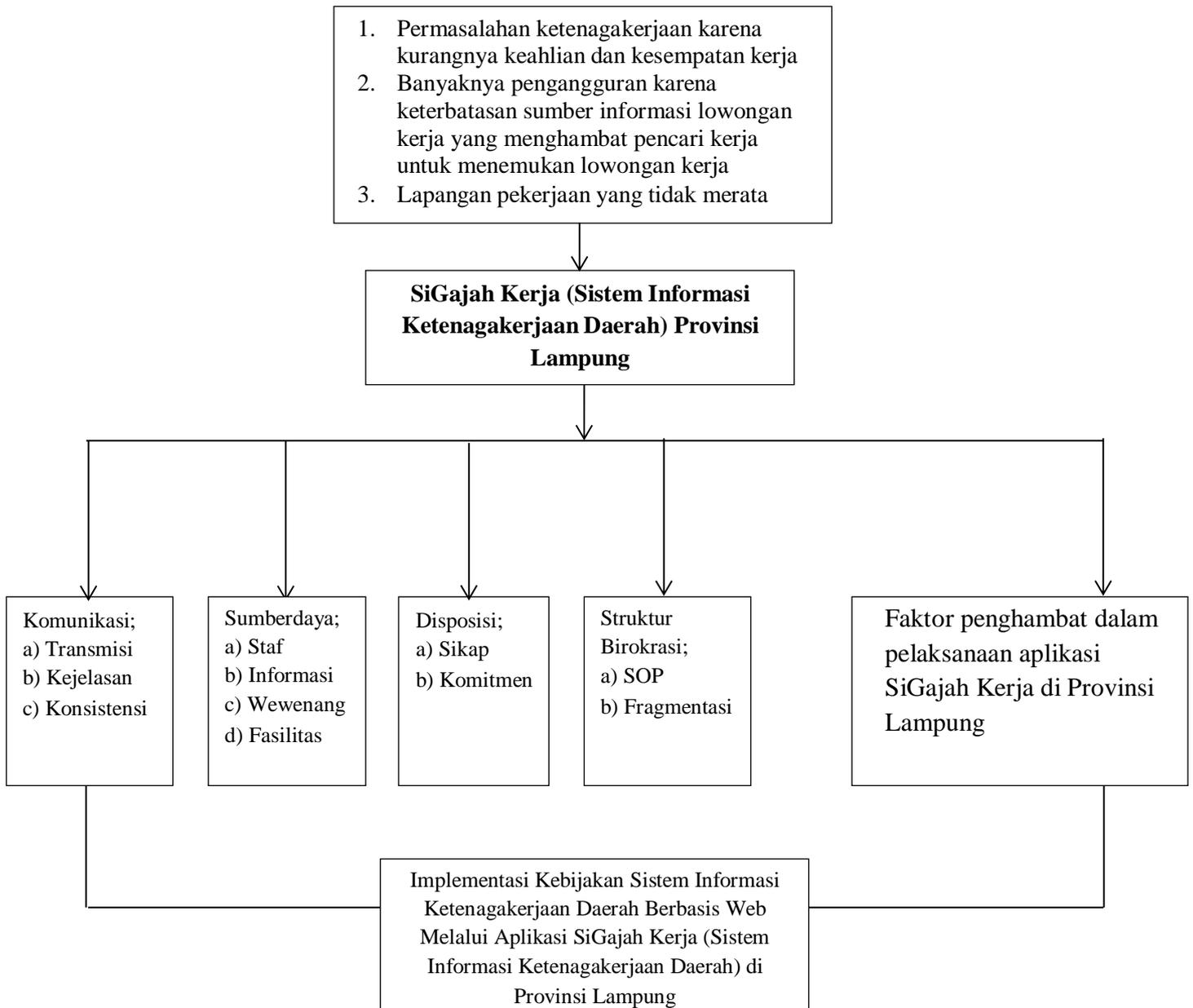
2.8 Kerangka Pemikiran

Ketenagakerjaan adalah salah satu permasalahan yang cukup serius yang terus dihadapi sejalan dengan perkembangan yang terus terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah pengangguran. Hal ini dapat terjadi beberapa faktor seperti angkatan kerja yang terus meningkat serta keterbatasan informasi dan kesempatan kerja bagi mereka yang mencari pekerjaan. Di Provinsi Lampung sendiri, jumlah angkatan kerja terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya seperti yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya.

Mengatasi hal tersebut Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja menyatakan bahwa instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik pusat maupun daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yaitu sebuah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja guna mengelola data dan informasi terkait ketenagakerjaan.

Perwujudan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu membuat sebuah program sistem informasi ketenagakerjaan daerah yaitu Aplikasi SiGajah Kerja. Bersamaan dengan tiga program lainnya, Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh Gubernur Arinal Djunaidi pada Februari 2022.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti yang sudah peneliti paparkan pada latar belakang yang berakibat bahwa implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih dalam untuk melihat bagaimana Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah daerah melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung dengan menggunakan teori analisis Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Kusnadi, 2020) dengan empat indikator pengukuran antara lain: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, 4) Struktur Organisasi.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam topik ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat post-positivisme, yang dikenal juga dengan pendekatan interpretatif karena meneliti data yang lebih mementingkan interpretasi data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2018).

Sedangkan, analisis deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan beberapa informasi yang menjadi pembahasan. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah melalui Aplikasi SiGajah Kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas pencari kerja di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah kegiatan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk memilih data – data yang relevan dan tidak relevan Moleong (dalam Lestari 2016). Adapun fokus Penelitian ini adalah implementasi kebijakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung berdasarkan model Implementasi program menurut George C. Edward III dengan empat indikator terkait yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi yaitu berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang dikomunikasikan dengan baik kepada organisasi atau masyarakat. Oleh karena itu, Komunikasi menentukan berhasil tidaknya tujuan implementasi kebijakan publik tercapai. Dalam penelitian ini, komunikasi akan dilihat melalui tiga aspek terkait diantaranya: a) Transmisi, yaitu bagaimana penyaluran informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai aplikasi SiGajah kerja; b) kejelasan, untuk melihat bagaimana proses kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat maupun perusahaan dalam sosialisasi terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi SiGajah kerja sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; c) Konsistensi, yaitu seperti apa kejelasan perintah mengenai kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan yang diberikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat melalui tiga indikator terkait yaitu: a) Staf, untuk melihat bagaimana kemampuan staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi SiGajah kerja; b) Informasi, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengetahuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai implementor terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi SiGajah kerja di provinsi lampung selain itu akan dilihat juga bagaimana kepatuhan para pelaksana dalam hal ini perusahaan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang pemerintah telah ditetapkan; c) Wewenang, bagaimana legitimasi bagi para pelaksana kebijakan baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat dalam implementasi kebijakan sistem informasi

ketenagakerjaan daerah daerah; d) Fasilitas, yaitu untuk melihat bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung dalam implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah daerah melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan efektif jika para pelaksana kebijakan mengetahui dan memiliki kemampuan tentang apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat seperti apa sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan seperti apa komitmen dalam pengimplementasian kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung

4) Struktur Birokrasi,

Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik. Adapun dua indikator yang harus diperhatikan dalam struktur organisasi antara lain: a) *Standar Operating Procedures* (SOP), dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan aplikasi SiGajah kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan; b) Fragmentasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab mengenai kegiatan pegawai sesuai dengan bidangnya masing – masing dalam hal ini dilihat bagaimana pelimpahan tanggung jawab mengenai implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung.

Penelitian ini juga berfokus untuk melihat apa saja faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan menurut Sunggono (dalam Anggi, 2021) tentang sistem informasi ketenagakerjaan melalui aplikasi SiGajah kerja di Provinsi Lampung

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang menjadi lokasi utama penelitian karena pelaksanaan Aplikasi SiGajah Kerja menjadi tanggung dari Dinas Daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap masyarakat dan perusahaan sebagai kelompok sasaran serta pengguna dalam implementasi Aplikasi SiGajah Kerja dan akan dilihat seperti apa pandangan masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan penyedia kerja setelah menggunakan Program ini, apakah sesuai dengan tujuan dari Aplikasi SiGajah Kerja itu sendiri.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang didapatkan secara langsung mengenai Aplikasi SiGajah Kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas pencari kerja di Provinsi Lampung baik diperoleh langsung dari observasi di lapangan maupun hasil dari wawancara dengan responden dari pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung serta masyarakat dan perusahaan penyedia kerja yang menjadi pengguna Program ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang memuat tentang informasi Aplikasi SiGajah Kerja yang diperoleh secara tidak langsung, dalam penelitian ini informasi tersebut berasal dari sumber tertulis seperti peraturan, jurnal penelitian terdahulu, buku dan media online serta informasi lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah daerah berbasis web melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk mendapatkan data dalam berbagai setting, berbagai sumber daya, dan cara yang berbeda (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga membangun makna dalam topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini dilakukan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengungkap masalah yang harus diteliti, dan jika peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang responden lakukan (Sugiyono 2018:304). dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan jalannya pelaksanaan Aplikasi SiGajah Kerja kepada beberapa narasumber antara lain:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Informan	Informasi yang ingin didapatkan	Tanggal Wawancara
1	Dian Rahmawati, S.sos (Kepala Seksi Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)	a. Landasan kebijakan b. Pelaksanaan Sosialisasi tentang aplikasi sigajah kerja c. Kemampuan Sumber Daya d. Pengetahuan implementor kebijakan e. Legitimasi impelementor kebijakan f. Fasilitas pendukung g. Komitmen dan sikap pelaksana aktor organisasi h. Standar operasional prosedur	14 September 2023

		<ul style="list-style-type: none"> i. Pelimpahan tanggung jawab pada bidang j. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 	
2	<p>Rose Nur Aldiva, A.Md.Ak</p> <p>(Staff Operator/Admin SiGajah Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan kebijakan b. Pelaksanaan Sosialisasi tentang aplikasi sigajah kerja c. Kemampuan Sumber Daya d. Pengetahuan implementor kebijakan e. Legitimasi implementor kebijakan f. Fasilitas pendukung g. Komitmen dan sikap pelaksana aktor organisasi h. Standar operasional prosedur i. Pelimpahan tanggung jawab pada bidang j. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 	14 September 2023
3	<p>Dian Eka Prayoga</p> <p>(Manajer HRD, PT Mahkota Pangan Citra Rasa “Holland Bakery”)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan kebijakan b. Pelaksanaan Sosialisasi tentang aplikasi sigajah kerja c. Pemahaman perusahaan tentang kebijakan d. Kemampuan Sumber Daya e. Pengetahuan implementor kebijakan f. Legitimasi perusahaan g. Fasilitas pendukung h. Komitmen dan sikap pelaksana aktor organisasi i. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 	14 September 2023

4	David Pratama (Staff Marketing, BFI Finance Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan kebijakan b. Pelaksanaan Sosialisasi tentang aplikasi sigajah kerja c. Pemahaman perusahaan tentang kebijakan d. Kemampuan Sumber Daya e. Pengetahuan implementor kebijakan f. Legitimasi perusahaan g. Fasilitas pendukung h. Komitmen dan sikap pelaksana aktor organisasi i. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 	10 Oktober 2023
5	Masyarakat a. Savira Marsha S. (Masyarakat Umum) b. Nanda Syafa (Masyarakat Umum)	<ul style="list-style-type: none"> a. Landasan kebijakan b. Pelaksanaan Sosialisasi tentang aplikasi sigajah kerja c. Pemahaman masyarakat tentang kebijakan d. Kemampuan Sumber Daya e. Peran Masyarakat f. Fasilitas pendukung g. Komitmen dan sikap pelaksana aktor organisasi h. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 	22 s/d 23 September 2023

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan datadengan melakukan pengamatan langsung dan tidak terbatas pada orang, tetapi pada objek – objek lainnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan observasi terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah daerah berbasis web melalui aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu yang ditulis sebagai buku harian, biografi, peraturan dan kebijakan, dll. Bisa juga dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, selain wawancara dengan informan yang relevan, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai penunjang pengumpulan data. Koleksi tersebut berupa dokumen kebijakan yang mengatur tentang implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah daerah berbasis web melalui aplikasi sigajah kerja diantaranya yaitu:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung; Surat Keputusan Gubernur Nomor G/635/V.08/HK/2021 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung (SiGajah Lampung) dalam Jaringan/Online
- b. Panduan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah (SiGajah)
- c. Laporan Pelaksanaan Program Penempatan Kesempatan Kerja (Aplikasi SiGajah Lampung)
- d. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2023
- e. Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- f. Data lain yang menunjang seperti buku, dokumentasi, internet, jurnal, serta sumber data sekunder lainnya

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya menjadi satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, memilih mana yang penting, dan apa yang akan dipelajari, lalu menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014), yang terbagi dalam tiga tahapan sebagai berikut:

1. **Kondensasi Data (*data condensation*)**

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya adalah setelah peneliti melakukan wawancara langsung di tempat dan memperoleh data tertulis, selanjutnya memilah transkrip wawancara untuk mendapatkan fokus penelitian yang peneliti butuhkan.

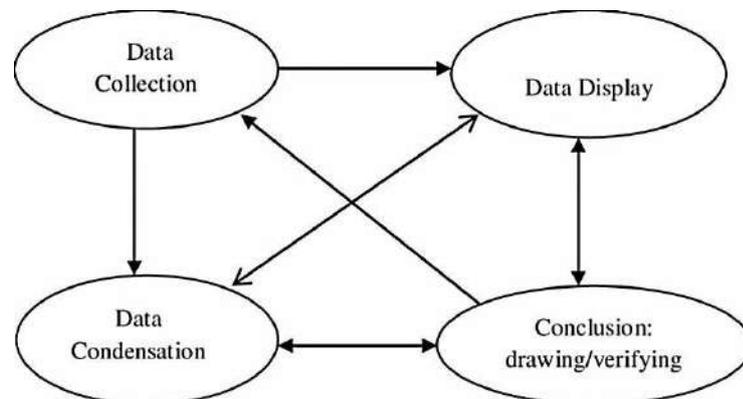
2. **Penyajian Data (*data display*)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melihat atau menyajikan data. Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan hasil data terkait Implementasi Implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah Daerah berbasis web melalui Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan

berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap data yang disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Terakhir adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan hasil data yang didapat Implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah berbasis web melalui Aplikasi SiGajah Kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas pencari kerja di Provinsi Lampung



Gambar 3. Komponen Analisis Data

Sumber : (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau validitas data merupakan derajat ketepatan data baik data yang ada pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh sang peneliti (Sugiyono 2018). Dalam penelitian kualitatif, teknik keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2018) Uji kredibilitas (*credibility*) adalah uji kepercayaan terhadap suatu data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat serta analisis kasus negatif dan member check.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis uji kredibilitas yang dipakai oleh peneliti yaitu triangulasi dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah berbasis web melalui pelaksanaan Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung baik dari bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian, hasil observasi, serta wawancara dengan narasumber di lapangan.

2. Uji Transferability

Transferability atau validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian tersebut ke populasi dimana sampel diambil. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif serta adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, peneliti harus membuat uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya agar dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti harus membuat uraian yang rinci, jelas, sistematis terkait bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah berbasis web melalui pelaksanaan Aplikasi SiGajah Kerja di Provinsi Lampung

3. Uji Dependability

Uji dependability yaitu dilakukan audit terhadap keseluruhan dalam proses penelitian mulai dari bagaimana peneliti menentukan fokus/masalah, menentukan sumber data, memasuki lapangan, membuat analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti. dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan oleh dosen pembimbing dalam mengaudit seluruh proses penelitian terkait Implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah berbasis web melalui Aplikasi SiGajah Kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas pencari kerja di Provinsi Lampung

4. Uji objektivitas (confirmability)

Uji kepastian atau confirmability adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan (sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, uji objektivitas dilakukan dengan menjelaskan proses penelitian yang dilakukan terkait Implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah berbasis web melalui Aplikasi SiGajah Kerja sebagai upaya peningkatan produktivitas pencari kerja di Provinsi Lampung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung yang ditinjau dari indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Kusnadi, 2020), maka diperoleh kesimpulan yaitu;

- a) Komunikasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan terkait penerapan aplikasi sigajah kerja diwujudkan dengan melakukan sosialisasi langsung melalui seminar dan secara tidak langsung melalui akun sosial media kepada perusahaan dan masyarakat tentang penerapan dan manfaat penggunaan aplikasi sigajah kerja, namun dalam penerapannya tersebut, walau komunikasi telah dilakukan, tetapi masih banyaknya perusahaan dan masyarakat yang enggan untuk ikut bergabung menggunakan aplikasi ini.
- b) Sumber daya, kecukupan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan staff dalam kemampuan untuk mengoperasikan dan mengembangkan aplikasi sigajah kerja, informasi pengetahuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai implementor kebijakan aplikasi sigajah kerja dan perusahaan sebagai pengguna dan penyalur informasi lowongan pekerjaan , kewenangan yang telah diatur dan tertulis secara politik dalam peraturan-peraturan yang berlaku tentang aplikasi sigajah kerja, serta adanya fasilitas yang telah tercipta dengan baik untuk menunjang jalannya penerapan aplikasi sigajah kerja.

- c) Disposisi, atau perilaku pelaksana dapat dilihat dengan sikap dan komitmen yang dikuat ditunjukkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang memiliki responsibilitas dan pengetahuan yang dalam tentang bagaimana penerapan aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung dalam mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan yang mudah terkait informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat.
- d) Struktur Organisasi, dalam hal tersebut struktur organisasi yang melaksanakan penerapan aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung belum optimal, hal ini terlihat dari tidak adanya SOP khusus pelaksanaan aplikasi sigajah kerja khususnya bagi perusahaan sebagai pengguna dan penyalur informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Adapun fragmentasi/pelimpahan tanggung jawab diberikan sepenuhnya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terkait pelaksanaan implementasi aplikasi sigajah kerja.

Namun terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam jalannya implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah melalui aplikasi sigajah kerja di provinsi lampung yang ditinjau menurut Sunggono (dalam Anggi, 2021) diantaranya yaitu; a) Isi kebijakan, dimana sangatlah mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Nyatanya, kebijakan yang mengatur tidak menjelaskan isi, mekanisme dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menggunakan program sigajah kerja sehingga kurangnya perhatian dan keberadaan aplikasi sigajah kerja dimata perusahaan dan masyarakat. b) Pembagian potensi yang berkaitan dengan pembagian tugas sesuai bidang dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini perkembangan aplikasi sigajah kerja terhambat karena kurangnya kerjasama antar bidang terkait perkembangan fitur dan sistem dalam aplikasi sigajah kerja. c) Dukungan, dalam hal ini pelaksanaan kebijakan akan sulit dilaksanakan jika dukungan yang diterima tidak cukup kuat. Pada penerapan aplikasi sigajah kerja, masih kurangnya kesadaran dan dukungan dari beberapa pengguna baik dari sisi perusahaan maupun masyarakat terhadap eksistensi penggunaan aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan aplikasi sigajah kerja belum efektif dilaksanakan penerapannya di Provinsi Lampung ini.

Adapun implikasi teori dalam penelitian implementasi kebijakan yaitu penggunaan teori George C.Edward III yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan di pemerintahan daerah dari satu sudut pandang penelitian yaitu pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini dimana peneliti menggunakan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C.Edward III untuk melihat bagaimana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai implementor kebijakana dapat menerapkan aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk implementasi kebijakan sistem informasi ketenagakerjaan daerah berbasis web melalui aplikasi sigajah kerja di Provinsi Lampung kedepannya diantaranya adalah:

1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dapat melakukan perbaikan sistem web agar aplikasi sigajah kerja dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di provinsi lampung lebih baik lagi dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan serta membantu meningkatkan keberadaan aplikasi sigajah kerja ini di mata masyarakat.
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dapat meningkatkan kerjasama dengan bidang lainnya terkait perkembangan fitur – fitur aplikasi sigajah kerja agar lebih mudah dalam mengakses lowongan pekerjaan yang tersedia di Provinsi Lampung.
3. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dapat diharapkan memperkuat kebijakan dan persyaratan apa saja yang tepat bagi keberlangsungan penerapan aplikasi sigajah kerja sehingga perusahaan dapat mengikuti regulasi yang berlaku terkait pelaksanaan aplikasi sigajah kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hutahaean, J. (2015). Konsep sistem informasi.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. dan Saldana, J.(2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*.
- Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Sudiartini, N. W. A., ... & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik*.
- Sedarmayanti, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan Keempat. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sueca, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan. *Medan: Sefa Bumi Persada*.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sumarsono, Sonny, 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Suparno, S. (2017). Implementasi kebijakan publik dalam praktek. *Dwiputra Pustaka Jaya*.
- Sutabri, T. (2012). Konsep sistem informasi.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.

Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2)
- Anggi, W. T. A. (2021). Implementasi Kebijakan PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan.

Asri, S. A., Sunaya, I. G. A. M., Rudiastari, E., & Setiawan, W. (2018). Web based information system for job training activities using personal extreme programming (PXP). In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 953, No. 1, p. 012092). IOP Publishing.

Arif, M. A., Zain, I. L., Delfiro, R., Febriyanti, F., Rizaldi, M. M., & Syamsir, S. (2022, November). Efektifitas Penerapan Program Sisnaker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 1, No. 2, pp. 109-119).

BPS Provinsi Lampung. (2023). *Lampung dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Lampung.

Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom, M.M.2006. Perancangan & Pembangunan SI. Andi offset. Jogjakarta.

Darmastuti, D. (2013). Implementasi metode simple additive weighting (SAW) dalam sistem informasi lowongan kerja berbasis web untuk rekomendasi pencari kerja terbaik. *JUSTIN (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 1(2), 114-119.

Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(5).

Hasti, N., Lesari, S., & Gustiana, I. (2019, November). Web-Based Internship Information System. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 662, No. 2, p. 022090). IOP Publishing.

Hayati, L. N., & Suarni, S. (2018). SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR DISNAKER KOTA MAKASSAR BERBASIS WEB. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 6(1), 2-10.

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.

Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 22-38.
<https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>

Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28-38.

- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Lestari, F. A. (2016). Analisis Perbandingan Antara Red Ocean Strategy Versus Blue Ocean Strategy Terhadap Coffee Shop di Yogyakarta. ., 1-14.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran terbuka dan determinannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 171-181.
- Pereira, A. D. P. S., & Hakim, A. (2015). Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (Sistema Informasaun Merkadu TRABALHU). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Subroto, W., Heriyanto, M., & Karneli, O. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(2), 66-73.
- Suprpto, W. (2011). Pengaruh ekspor hasil industri non migas terhadap sektor industri manufaktur serta implikasinya terhadap pengangguran di indonesia. *JURNAL EKONOMI*, 13(1), 56-68.
- Testaverde, M., Posadas, J., & Cho, I. (2021). Toward a world-class labor market information system for Indonesia: an assessment of the system managed by the Indonesian Ministry of Manpower. *World Bank Research Publication, Washington DC*.
- Waters, K. P., Zuber, A., Willy, R. M., Kiriinya, R. N., Waudo, A. N., Oluoch, T., ... & Riley, P. L. (2013). Kenya's health workforce information system: a model of impact on strategic human resources policy, planning and management. *International journal of medical informatics*, 82(9), 895-902.

Widayati, T. (2021). A. Pengertian Pengangguran. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, 1, 50.

WINOWODA, T., & TULUSAN, F. (2022). KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENYELESAIKAN BERKAS TAGIHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA BAGIAN UMUM. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(4), 211-221.

Website / Peraturan lainnya

Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Saputra B (2022). Aplikasi SiGajah, Mudahkan Masyarakat Lampung Mencari Kerja. Diakses 16 November 2023, dari: <https://lampung.tribunnews.com/2022/02/07/aplikasi-sigajah-mudahkan-masyarakat-lampung-mencari-kerja>

Khoiriah S (2022). Dari 9 Ribu Perusahaan di Lampung, Baru 2 Persen yang Gunakan Aplikasi SiGajah Kerja. Diakses 1 Agustus 2023, dari: <https://kupastuntas.co/2022/08/18/dari-9-ribu-perusahaan-di-lampung-baru-2-persen-yang-gunakan-Program-sigajah>

Lampung.bps.go.id (2023). Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Diakses 1 Agustus 2023, dari: <https://lampung.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja>.

Lampungprov.go.id (2022). Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Luncurkan Aplikasi SiGajah Kerja Lampung Bagi Pencari-Pemberi Pekerjaan. Diakses 1 Agustus 2023, dari: <https://www.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-lampung-arinal-djunaidi-luncurkan-Program-sigajah-lampung-bagi-pencari-pemberi-pekerjaan>

Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). SiGajah Kerja [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ce5xIKqptiw>

Ppid.lampungprov.go.id (2022). Sekdaprov Buka Acara Sosialisasi Aplikasi SiGajah Kerja Lampung. Diakses 1 Agustus 2023, dari: <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Sekdaprov-Buka-Acara-Sosialisasi-Program-SiGajah-Lampung>

Sadya S (2022). Tingkat Pengangguran Indonesia Capai 5,86% pada Agustus 2022. Diakses 1 Agustus 2023, dari: <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/tingkat-pengangguran-indonesia-capai-586-pada-agustus-2022>